

Relasi Agama dan Negara sebagai Basis Ketahanan Budaya: Membaca Pemikiran John Madeley dalam Konteks Islam-Melayu

Yuana Ryan Tresna^{1*}

¹ UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

*Corresponding author: yuanyant@gmail.com

Abstrak: Relasi antara agama dan negara merupakan isu fundamental yang membentuk identitas budaya dan peradaban masyarakat, khususnya di dunia Melayu yang memiliki sejarah panjang interaksi dinamis antara agama, kekuasaan politik, dan tradisi lokal. Artikel ini menelaah secara kritis bab “Religion and the State” karya John Madeley dalam *Routledge Handbook of Religion and Politics* untuk mengidentifikasi kerangka teoritis yang relevan dalam memahami agama sebagai sumber ketahanan budaya di tengah tatanan global yang semakin multipolar. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif berbasis analisis wacana kritis, penelitian ini memfokuskan pada argumen-argumen utama Madeley mengenai kompleksitas hubungan agama dan negara, meliputi kritik terhadap teori sekularisasi klasik, tipologi hubungan agama-negara, serta pengaruh faktor sejarah dan globalisasi. Analisis ini menghubungkan pemikiran Madeley dengan konteks Islam di dunia Melayu, di mana agama terus berfungsi sebagai fondasi moral, sosial, dan kultural dalam menjaga identitas dan ketahanan komunal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Madeley menawarkan kerangka analisis yang lebih fleksibel dan berbasis historis dibandingkan pendekatan sekularisasi klasik. Kerangka tersebut memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran agama dalam memperkuat kohesi sosial dan ketahanan budaya di tengah transformasi global. Dalam konteks Islam-Melayu, temuan ini menyoroti potensi integrasi nilai-nilai Islam dengan tradisi lokal sebagai fondasi pengembangan ekoteologi Islam-Melayu yang mendukung keberlanjutan budaya serta respons terhadap tantangan era multipolar. Artikel ini merekomendasikan penelitian lanjutan yang lebih inklusif dan interdisipliner mengenai kontribusi tradisi Islam-Melayu dalam membangun ketahanan budaya dan peradaban yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Agama dan Negara, John Madeley, Dunia Melayu, Ketahanan Budaya, Ekoteologi Islam-Melayu, Multipolaritas, Analisis Wacana Kritis.

Pendahuluan

Hubungan antara agama dan negara merupakan salah satu isu paling fundamental dan kontroversial dalam studi politik, sosiologi agama, serta ilmu kebudayaan kontemporer (Madeley, 2009, pp. 174–191). Sejak akhir abad ke-20, dunia menyaksikan kebangkitan kembali agama (*religious resurgence*) sebagai kekuatan politik yang signifikan, baik di tingkat domestik maupun internasional (Berger, 1999, pp. 1–18; Casanova, 1994, pp. 3–15). Fenomena ini bertentangan dengan prediksi teori sekularisasi klasik yang mengasumsikan bahwa modernisasi, rasionalisasi, dan diferensiasi struktural akan secara linear menggerus peran agama di ruang publik (Bruce, 2011, pp. 1–12; Wilson, 1982).

Dalam konteks dunia Melayu—yang mencakup wilayah Asia Tenggara dengan sejarah panjang interaksi antara Islam, kekuasaan politik, dan tradisi lokal—agama tidak hanya bertahan tetapi justru menjadi pilar utama ketahanan budaya (*cultural resilience*) (Azra, 2006, pp. 45–67; Hefner, 2019, pp. 789–810). Nilai-nilai Islam yang terintegrasi dengan adat Melayu telah membentuk identitas peradaban yang adaptif di tengah gelombang globalisasi dan dinamika tatanan dunia yang semakin multipolar (Ali, 2022, pp. 45–62; Hooker, 2003, pp. 12–35). John Madeley, dalam babnya “Religion and the State” (*Routledge Handbook of Religion and Politics*, 2009), menawarkan perspektif alternatif yang kaya untuk memahami kompleksitas relasi ini, dengan menekankan dimensi historis, komparatif, dan kontekstual yang melampaui narasi sekularisasi Barat-sentris (Madeley, 2009, pp. 175–180).

Sebagian besar literatur tentang relasi agama dan negara masih didominasi oleh perspektif Barat yang memandang sekularisasi sebagai keniscayaan sejarah (Fox, 2008, pp. 1–25). Teori klasik yang dikemukakan oleh Bryan Wilson, Peter Berger (pada fase awalnya), dan Steve Bruce cenderung melihat modernisasi sebagai proses yang melemahkan otoritas agama melalui diferensiasi institusional, rasionalisasi, dan privatisasi keyakinan (Berger, 1967; Bruce, 2011, pp. 56–78; Wilson, 1982, pp. 148–179). Pendekatan ini bersifat teleologis, mengasumsikan bahwa semakin modern suatu masyarakat, semakin menurun peran agama di ruang publik.

Namun, John Madeley mengkritik pendekatan tersebut sebagai terlalu sempit dan kurang mampu menjelaskan variasi historis serta geografis yang kompleks dalam hubungan agama-negara (Madeley, 2009, pp. 175–178). Dalam konteks Asia Tenggara, khususnya dunia Melayu, dinamika relasi agama dan negara menunjukkan pola yang khas berupa “modernisasi tanpa sekularisasi penuh” (*modernization without full secularization*) (Casanova, 2011, pp. 54–74; Hefner, 2019, pp. 789–810). Islam tidak hanya bertahan, tetapi menjadi kekuatan kohesif yang memperkuat ketahanan budaya masyarakat Melayu di tengah arus globalisasi, pluralisme agama, dan perubahan geopolitik multipolar (Aljunied, 2021, pp. 45–67; Azra, 2006, pp. 89–112).

Meskipun demikian, kajian yang secara khusus menghubungkan kerangka teoritis Madeley dengan konteks Islam-Melayu masih sangat terbatas. Gap penelitian yang signifikan terletak pada minimnya analisis komparatif yang mengintegrasikan perspektif non-Barat, khususnya bagaimana agama berperan sebagai basis ketahanan budaya dalam menghadapi tantangan era kontemporer (Ali, 2022, pp. 78–95; Haynes, 2019, pp. 1025–1042). Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut melalui telaah kritis terhadap pemikiran Madeley dengan penekanan pada relevansinya bagi dunia Melayu.

Berdasarkan latar belakang dan gap penelitian di atas, artikel ini mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Apa saja argumen utama yang dibangun John Madeley dalam “Religion and the State” mengenai relasi agama dan negara?
- 2) Bagaimana kekuatan dan kelemahan argumentasi Madeley tersebut ketika dievaluasi dalam konteks kajian agama, politik, dan ketahanan budaya di dunia Melayu?
- 3) Bagaimana relevansi pemikiran Madeley bagi pengembangan kerangka relasi agama-negara yang mendukung ketahanan budaya Islam-Melayu di era multipolar?

Penelitian ini bertujuan untuk:

- 1) Mengidentifikasi dan menganalisis argumen-argumen utama Madeley dalam “Religion and the State”.
- 2) Mengevaluasi kekuatan dan kelemahan argumentasinya dalam perspektif kontemporer, khususnya konteks Islam-Melayu.
- 3) Memberikan rekomendasi teoritis dan praktis bagi pengembangan studi relasi agama-negara sebagai basis ketahanan budaya di dunia Melayu.

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan wacana akademik tentang relasi agama dan negara. Dengan mengintegrasikan kerangka analisis John Madeley yang historis-komparatif dengan perspektif Islam-Melayu, kajian ini menawarkan pendekatan yang lebih inklusif dan kontekstual, sehingga memperkaya studi agama dan politik yang selama ini didominasi perspektif Barat. Penelitian ini juga memperkuat konsep ketahanan budaya (*cultural resilience*) sebagai kategori analitis baru dalam memahami dinamika agama-negara di negara-negara berbasis masyarakat majemuk, khususnya di Asia Tenggara.

Secara praktis, hasil telaah ini dapat menjadi bahan rekomendasi bagi pembuat kebijakan dalam merancang model relasi agama-negara yang adaptif dan resilien. Di Indonesia, temuan penelitian ini relevan untuk menjaga harmoni antarumat beragama sekaligus mempertahankan identitas keislaman dalam kehidupan berbangsa.

Lebih jauh, penelitian ini memberikan implikasi yang luas bagi upaya membangun ketahanan budaya di tengah dinamika global yang multipolar. Dalam era di mana globalisasi dan arus transnasional sering menimbulkan ketegangan identitas, integrasi nilai-nilai Islam-Melayu dapat menjadi model bagi negara-negara Muslim lainnya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya khazanah keilmuan, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan peradaban yang berkelanjutan di dunia Melayu.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka (*library research*) (Creswell & Creswell, 2018, pp. 179–185). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami makna, konteks, dan kompleksitas relasi agama dan negara sebagaimana diuraikan oleh John Madeley, serta relevansinya dengan ketahanan budaya dalam konteks Islam-Melayu. Studi pustaka dipandang paling sesuai karena penelitian ini berfokus pada analisis mendalam terhadap teks primer dan literatur terkait, tanpa melibatkan pengumpulan data lapangan (Zed, 2008, pp. 12–28).

Penelitian ini secara khusus mengadopsi analisis wacana kritis (*Critical Discourse Analysis/CDA*) sebagai pendekatan utama. CDA dipilih karena memungkinkan peneliti tidak hanya mendeskripsikan isi teks, tetapi juga mengungkap relasi kekuasaan, ideologi, dan konteks sosial-historis di balik wacana tersebut (Fairclough, 2010, pp. 1–15). Pendekatan ini selaras dengan tujuan penelitian untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan pemikiran Madeley dalam perspektif kontemporer dan konteks non-Barat.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah bab “Religion and the State” karya John Madeley yang dimuat dalam *Routledge Handbook of Religion and Politics* (2009) (Madeley, 2009, pp. 174–191). Sumber data sekunder meliputi berbagai literatur ilmiah yang relevan, meliputi buku, artikel jurnal peer-reviewed, dan laporan penelitian yang membahas teori sekularisasi, tipologi agama-negara, ketahanan budaya, serta dinamika Islam di dunia Melayu. Pemilihan sumber sekunder dilakukan secara purposive sampling berdasarkan relevansi, kredibilitas, dan kontemporeritas publikasi (Miles et al., 2014, pp. 31–35).

Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dan studi pustaka yang sistematis. Proses ini mencakup pembacaan intensif (*close reading*), pencatatan, dan klasifikasi tema-tema utama dari teks Madeley serta literatur pendukung. Seluruh bahan pustaka dicatat secara teliti dengan memperhatikan konteks historis, argumen utama, serta implikasi teoritisnya (Hadi, 2001, pp. 78–85).

Analisis data dilakukan dengan metode analisis wacana kritis yang mengacu pada kerangka Norman Fairclough. Model ini mencakup tiga dimensi analisis yang saling terkait:

- 1) Dimensi teks (mikro) — analisis linguistik dan isi teks secara langsung;
- 2) Dimensi praktik diskursif (meso) — bagaimana teks diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi;
- 3) Dimensi praktik sosiokultural (makro) — hubungan antara wacana dengan konteks sosial, politik, dan ideologis yang lebih luas (Fairclough, 2010, pp. 59–78; Wodak & Meyer, 2009, pp. 1–32).

Pendekatan tiga dimensi ini memungkinkan peneliti untuk mengungkap tidak hanya apa yang dikatakan Madeley, tetapi juga bagaimana argumen tersebut dibangun dan mengapa ia memiliki signifikansi tertentu dalam konteks global dan lokal Islam-Melayu. Proses analisis dilakukan secara iteratif, dimulai dari pembacaan awal, identifikasi tema, pemetaan argumen, hingga sintesis kritis yang menghubungkan pemikiran Madeley dengan isu ketahanan budaya (Fairclough, 2003, pp. 205–220).

Untuk menjamin keabsahan (*validity*) dan reliabilitas, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber data dan peer debriefing terhadap interpretasi yang dihasilkan.

Hasil dan Pembahasan

1. Kritik terhadap Teori Sekularisasi

John Madeley membuka babnya dengan kritik yang sistematis dan tajam terhadap teori sekularisasi klasik yang telah mendominasi kajian agama dan politik selama lebih dari setengah abad (Madeley, 2009). Para pemikir klasik seperti Bryan Wilson, Peter Berger (pada periode awalnya), dan Steve Bruce berargumen bahwa proses modernisasi—yang meliputi industrialisasi, urbanisasi, rasionalisasi, diferensiasi struktural, dan kemajuan ilmu pengetahuan—pada akhirnya akan menyebabkan penurunan signifikan bahkan kematian pengaruh agama di ruang publik (Berger, 1967; Bruce, 2011; Wilson, 1982). Teori ini bersifat teleologis, memandang sekularisasi sebagai keniscayaan sejarah yang tak terelakkan seiring kemajuan peradaban modern.

Madeley menolak pandangan teleologis ini dengan tegas. Ia menunjukkan bahwa sekularisasi bukanlah proses linear dan universal, melainkan sangat bergantung pada konteks historis, politik, budaya, dan institusional masing-masing masyarakat (Madeley, 2009). Sebagai bukti, Madeley menganalisis kasus Eropa Barat yang selama ini dijadikan model sekularisasi sukses. Meskipun terjadi diferensiasi institusional yang mendalam, negara-negara seperti Inggris masih mempertahankan *Church of England* sebagai gereja negara dengan uskup yang duduk di *House of Lords*. Demikian pula di negara-negara Skandinavia (Denmark, Norwegia, Swedia), gereja Lutheran tetap didanai negara dan terlibat dalam urusan administrasi sipil seperti pencatatan kelahiran, pernikahan, dan kematian (Madeley, 2009).

Temuan ini menggambarkan bahwa sekularisasi di Eropa lebih bersifat institusional daripada kultural. Masyarakat tetap menunjukkan tingkat religiusitas yang signifikan dalam kehidupan pribadi dan moral publik. Pendekatan Madeley ini selaras dengan revisi pemikiran Peter Berger sendiri yang kemudian mengakui fenomena *desecularization* di banyak belahan dunia, terutama di luar Eropa Barat (Berger, 1999). Ia juga mengadopsi konsep diferensiasi fungsional yang dikemukakan José Casanova, di mana agama kehilangan monopoli atas berbagai institusi publik (pendidikan, kesehatan, hukum), tetapi tetap mempertahankan peran penting sebagai kekuatan moral, identitas kolektif, dan oposisi politik (Casanova, 1994, 2011).

Dalam konteks dunia Melayu, kritik Madeley terhadap teori sekularisasi klasik menjadi sangat relevan. Di Indonesia dan Malaysia, Islam tidak mengalami kemunduran yang signifikan meskipun terjadi modernisasi yang pesat. Sebaliknya, agama Islam yang terintegrasi dengan tradisi lokal justru menjadi sumber ketahanan budaya (*cultural resilience*) yang kuat di tengah arus globalisasi dan pluralisme (Aljunied, 2021; Azra, 2006; Hefner, 2019). Nilai-nilai Islam terus berfungsi sebagai landasan moral dan identitas kolektif masyarakat Melayu.

Dengan demikian, Madeley mengajak para peneliti untuk meninggalkan narasi “kematian agama” dan beralih ke analisis yang lebih nuansa mengenai negosiasi batas-batas pengaruh antara agama dan negara (Madeley, 2009). Pendekatan ini membuka ruang bagi pemahaman yang lebih kontekstual, terutama dalam melihat peran agama sebagai basis ketahanan budaya di dunia Melayu di era multipolar saat ini.

2. Tipologi Hubungan Agama-Negara

Kontribusi paling orisinal dari John Madeley adalah pengembangan tipologi hubungan agama-negara yang jauh lebih halus dan empiris dibandingkan dikotomi sederhana “negara sekuler” versus “negara teokratis” (Madeley, 2009). Dengan memanfaatkan data komprehensif dari *Religion and State* (RAS) Project yang dikembangkan Jonathan Fox, Madeley mengidentifikasi enam model idealtipe sebagai kerangka analisis yang fleksibel (Fox, 2008; Madeley, 2009):

- 1) *Established Religion* — Negara secara formal menetapkan satu atau lebih agama sebagai agama resmi negara (contoh: Inggris dengan *Church of England*, Denmark, dan Arab Saudi).
- 2) *Endorsed Religion* — Negara memberikan pengakuan istimewa pada agama tertentu dalam tradisi nasional tanpa penetapan formal (contoh: Irlandia, Polandia, Spanyol).
- 3) *Cooperationist* — Kerja sama aktif dan institusional antara negara dan organisasi keagamaan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial (contoh: Jerman dan Italia).

- 4) *Accommodationist* — Negara bersikap netral secara formal tetapi secara aktif mengakomodasi kebutuhan praktik keagamaan dalam kebijakan publik (contoh: Amerika Serikat pasca-1990-an).
- 5) *Separationist* — Pemisahan tegas antara agama dan negara (contoh: Prancis dengan prinsip *laïcité* dan Turki era Atatürk).
- 6) *Hostile* — Negara secara aktif memusuhi dan menekan praktik keagamaan (contoh: Albania era komunis dan Korea Utara saat ini).

Tipologi ini sangat bermanfaat karena memungkinkan analisis komparatif yang presisi dan kontekstual, melampaui pendekatan normatif yang kaku. Madeley menunjukkan bahwa mayoritas negara di dunia, termasuk negara-negara demokrasi liberal, tidak berada pada ekstrem *separationist* melainkan pada spektrum *cooperationist* hingga *accommodationist*. Bahkan Amerika Serikat, yang dikenal dengan *First Amendment*-nya yang menjamin pemisahan gereja dan negara, telah mengalami pergeseran signifikan ke arah model *accommodationist* sejak akhir abad ke-20, terutama dalam isu pendanaan sekolah berbasis agama dan pengakuan simbol-simbol religius di ruang publik (Madeley, 2009).

Kekayaan variasi menunjukkan keterbatasan tipologi Madeley yang masih cenderung Euro-sentris. Meskipun demikian, kerangka ini tetap memberikan landasan teoritis yang kuat untuk memahami bagaimana relasi agama-negara dapat menjadi basis ketahanan budaya (*cultural resilience*) di tengah tantangan globalisasi dan multipolaritas. Di dunia Melayu, integrasi nilai-nilai Islam dengan tradisi lokal melalui model *hybrid* ini tidak hanya menjaga identitas peradaban, tetapi juga menciptakan mekanisme adaptasi yang resilien terhadap tekanan eksternal (Ali, 2022; Aljunied, 2021; Azra, 2006).

Secara keseluruhan, tipologi Madeley membuka ruang dialog yang lebih inklusif antara perspektif Barat dan non-Barat, sekaligus menegaskan bahwa agama tetap menjadi kekuatan hidup yang dinamis dalam kehidupan bernegara di era kontemporer (Madeley, 2009).

3. Peran Sejarah dan Globalisasi

Madeley menekankan bahwa relasi agama dan negara tidak dapat dipahami secara terpisah dari konteks historis yang membentuknya. Perjanjian Westphalia (1648), yang mengakhiri Perang Tiga Puluh Tahun di Eropa, menjadi titik balik krusial. Meskipun sering dipahami sebagai awal sekularisasi internasional, perjanjian ini justru memperkuat prinsip *cuius regio, eius religio* (siapa yang berkuasa, dialah yang menentukan agama), sehingga mempererat ikatan antara agama dan kedaulatan negara di tingkat domestik (Madeley, 2009).

Globalisasi kontemporer kemudian membawa dinamika yang jauh lebih kompleks. Migrasi massal menciptakan masyarakat super-plural di berbagai negara, sementara gerakan keagamaan transnasional seperti Muslim Brotherhood, Al-Qaeda dan Hizbut Tahrir menantang batas-batas negara-bangsa melalui konsep *ummah* (komunitas Muslim global) yang melampaui loyalitas nasional (Haynes, 2019; Madeley, 2009).

Di dunia Melayu, ketegangan ini terlihat jelas dalam dinamika antara arus pemikiran Salafi-Wahabi transnasional yang cenderung puritan dengan tradisi Islam Nusantara yang lebih akomodatif, kultural, dan kontekstual. Ketegangan tersebut sekaligus menjadi ujian sekaligus peluang bagi ketahanan budaya Islam-Melayu. Semangat Islam *rahmatan lil 'alamin* berperan sebagai filter dan penyeimbang, sehingga agama tetap menjadi sumber resiliensi budaya di tengah arus global yang disruptif (Aljunied, 2021; Azra, 2006).

4. Kekuatan dan Kelemahan Argumentasi Madeley

Kekuatan utama argumentasi John Madeley terletak pada tiga pilar yang kokoh: pendekatan historis-komparatif yang mendalam, penolakan tegas terhadap narasi teleologis sekularisasi, serta penggunaan data empiris yang kuat dari *Religion and State* (RAS) Project yang dikembangkan Jonathan Fox (Fox, 2008; Madeley, 2009). Kerangka analisisnya bersifat fleksibel dan kontekstual, mampu menjelaskan variasi relasi agama-negara di berbagai rezim politik dan budaya tanpa terjebak dalam dikotomi simplistik. Pendekatan ini tidak hanya mendeskripsikan fenomena, tetapi juga menawarkan alat analisis yang operasional bagi peneliti untuk memetakan dinamika kontemporer yang kompleks.

Madeley berhasil membongkar mitos sekularisasi linear dengan bukti historis yang meyakinkan, sekaligus menunjukkan bahwa agama tetap menjadi variabel politik yang dinamis. Penggunaan data RAS memberikan fondasi empiris yang solid, sehingga argumentasinya tidak bersifat spekulatif semata. Fleksibilitas tipologinya memungkinkan penerapan lintas konteks, menjadikannya referensi penting dalam studi agama dan politik kontemporer (Fox, 2008; Madeley, 2009).

Meskipun demikian, terdapat beberapa kelemahan signifikan dalam argumentasi Madeley. Pertama, analisisnya masih sangat Euro-sentris. Meskipun ia menyebut beberapa tradisi agama non-Barat, mayoritas contoh dan pembahasan berpusat pada pengalaman Eropa Barat dan Utara. Hal ini menyebabkan kurangnya kepekaan terhadap dinamika agama-negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin yang memiliki pola historis dan kultural berbeda (Madeley, 2009).

Kedua, Madeley hampir sepenuhnya mengabaikan dimensi gender. Padahal, relasi agama dan negara sering kali memiliki implikasi langsung terhadap hak-hak perempuan, seperti dalam reformasi hukum keluarga,

pendidikan, dan regulasi tubuh perempuan (misalnya isu jilbab). Di banyak negara Muslim, negara berada dalam posisi ambigu antara mengakomodasi tuntutan agama dan melindungi kesetaraan gender.

Ketiga, terdapat minimnya perhatian terhadap aktor non-negara. Madeley terlalu berfokus pada institusi negara, sementara organisasi masyarakat sipil keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah di Indonesia, atau jaringan transnasional seperti Muslim Brotherhood dan Hizbut Tahrir, memiliki peran yang sangat strategis dalam membentuk opini publik, menyediakan layanan sosial, dan memengaruhi kebijakan negara. Kelemahan-kelemahan ini menunjukkan perlunya pengayaan kerangka Madeley dengan perspektif yang lebih inklusif dan interdisipliner.

5. Relevansi bagi Ketahanan Budaya Islam-Melayu

Kerangka analisis John Madeley memberikan fondasi teoritis yang kokoh untuk memahami agama sebagai basis ketahanan budaya (*cultural resilience*) di dunia Melayu. Tipologi hubungan agama-negara yang ditawarkan Madeley, khususnya model *accommodationist* dan *cooperationist*, sangat relevan untuk menjelaskan dinamika relasi agama dan negara di kawasan ini (Madeley, 2009). Model *hybrid* semacam ini memungkinkan negara untuk mengakomodasi praktik keagamaan secara luas sekaligus memperkuat kohesi sosial dan identitas budaya masyarakat tanpa jatuh pada ekstrem teokrasi atau sekularisme radikal.

Pengembangan ekoteologi Islam-Melayu menjadi salah satu arah paling menjanjikan. Ekoteologi ini mengintegrasikan nilai tauhid (keesaan Tuhan), keadilan sosial (*adl*), tanggung jawab lingkungan (*khalifah fi al-ardh*), dan semangat *rahmatan lil 'alamin* yang akomodatif dan kontekstual. Nilai-nilai Islam yang bersifat kultural dan inklusif — sebagaimana diwariskan oleh tradisi Wali Songo — dapat menjadi kekuatan moral yang adaptif dalam menghadapi tantangan multipolaritas global, seperti perubahan iklim, migrasi, dan lain-lain.

Dengan demikian, kerangka Madeley tidak hanya diperkaya, tetapi juga diperluas oleh perspektif non-Barat. Model Islam-Melayu menunjukkan bahwa agama dapat menjadi sumber ketahanan budaya yang dinamis, mampu menyerap tekanan eksternal sambil mempertahankan identitas lokal yang khas. Hal ini membuktikan keterbatasan tipologi Madeley yang Euro-sentris sekaligus membuka peluang pengembangan teori yang lebih luas.

6. Implikasi Teoritis dan Praktis

Secara teoritis, telaah kritis terhadap pemikiran Madeley memperkuat pentingnya pendekatan kontekstual, historis, dan interdisipliner dalam studi agama dan politik. Kombinasi antara kerangka Madeley dengan perspektif Islam-Melayu menciptakan jembatan epistemologis antara teori Barat dan pengalaman masyarakat non-Barat, sehingga memperkaya khazanah keilmuan global dengan perspektif yang lebih berimbang dan representatif.

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan strategis bagi pembuat kebijakan dalam merancang model relasi agama-negara yang mendukung harmoni sosial, ketahanan budaya, dan pembangunan berkelanjutan. Di Indonesia, implikasi ini relevan untuk pengembangan kebijakan pendidikan agama, serta pengelolaan isu-isu kontemporer seperti radikalisme, gender, dan lingkungan.

Penelitian lanjutan diharapkan dapat mengembangkan model-model *hybrid* baru yang lebih responsif terhadap isu kontemporer, dan tantangan lingkungan di dunia Melayu. Dengan demikian, agama tidak lagi dipandang sebagai variabel yang harus “dikelola” negara semata, melainkan sebagai mitra strategis dalam membangun peradaban yang berkeadaban, resilien, dan berkelanjutan di era multipolar.

Kesimpulan

Artikel John Madeley “Religion and the State” memberikan kontribusi signifikan bagi studi relasi agama dan negara melalui kerangka analisis yang historis, komparatif, dan fleksibel (Madeley, 2009, pp. 190–191). Madeley berhasil mendekonstruksi narasi teleologis teori sekularisasi klasik dan menunjukkan bahwa agama tetap menjadi kekuatan politik yang dinamis di era modern. Dengan memanfaatkan data empiris Religion and State (RAS) Project, ia menawarkan tipologi hubungan agama-negara yang lebih nuansa, sehingga membuka ruang pemahaman yang lebih kontekstual di tengah kompleksitas global kontemporer (Fox, 2008, pp. 345–367).

Kekuatan utama pemikiran Madeley terletak pada penolakannya terhadap dikotomi simplistik serta penekanan pada negosiasi terus-menerus antara agama dan negara. Ia membuktikan bahwa bahkan di Eropa Barat—yang sering dianggap sebagai model sekularisasi sukses—masih terdapat berbagai bentuk keterkaitan institusional, seperti *established church* di Inggris dan sistem kerjasama di Skandinavia. Pendekatan ini memperkaya kajian agama dan politik dengan perspektif yang anti-dogmatis dan historis (Casanova, 1994, pp. 211–225).

Meskipun demikian, artikel Madeley menyisakan beberapa keterbatasan. Analisisnya masih cenderung Euro-sentris, minim membahas dimensi gender, serta kurang memberikan perhatian pada peran aktor non-negara seperti organisasi masyarakat sipil keagamaan. Dalam konteks dunia Melayu, kelemahan ini menjadi semakin terlihat. Di Indonesia, model *hybrid accommodationist-cooperationist* menunjukkan bahwa agama tidak sekadar diakomodasi negara, melainkan menjadi sumber nilai dan ketahanan budaya (*cultural resilience*) yang integral

(Azra, 2006, pp. 95–112).

Relevansi pemikiran Madeley bagi konteks Islam-Melayu sangat tinggi. Tradisi Islam Nusantara yang akomodatif dan berbasis *rahmatan lil 'alamin* dapat memperkaya tipologi Madeley dengan model yang resilien di tengah multipolaritas global. Integrasi nilai-nilai Islam dengan tradisi lokal membuktikan bahwa agama mampu menjadi basis ketahanan budaya, bukan ancaman bagi modernitas (Hefner, 2019, pp. 789–810).

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih inklusif: mengembangkan model *shared values* yang menjadikan prinsip moral universal dari agama (keadilan, kasih sayang, tanggung jawab sosial) sebagai fondasi kebijakan publik tanpa jatuh pada teokrasi atau sekularisme ekstrem. Dialog berkelanjutan antara negara, pemuka agama, dan masyarakat sipil juga krusial agar agama menjadi mitra aktif dalam pembangunan peradaban yang berkeadaban dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, telaah kritis terhadap pemikiran Madeley menegaskan bahwa tantangan masa depan bukanlah memisahkan agama dari negara, melainkan menemukan mekanisme integrasi yang harmonis. Di dunia Melayu, model semacam ini tidak hanya memperkuat ketahanan budaya, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan peradaban Islam yang adaptif di era global multipolar (Ali, 2022, pp. 78–95).

Daftar Pustaka

- Aljunied, Syed Muhammad Khairudin. *Islam in Southeast Asia: A Critical Introduction*. London: Routledge, 2021.
- Azra, Azyumardi. *Islam in the Indonesian World: An Account of Institutional Formation*. Bandung: Mizan, 2006.
- Berger, Peter L. *The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion*. New York: Anchor Books, 1967.
- Berger, Peter L. “The Desecularization of the World: A Global Overview.” In *The Desecularization of the World: Resurgent Religion and World Politics*, edited by Peter L. Berger, 1–18. Grand Rapids: Eerdmans, 1999.
- Bruce, Steve. *Secularization: In Defence of an Unfashionable Theory*. Oxford: Oxford University Press, 2011.
- Casanova, José. *Public Religions in the Modern World*. Chicago: University of Chicago Press, 1994.
- Casanova, José. “The Secular, Secularizations, Secularisms.” In *Rethinking Secularism*, edited by Craig Calhoun, Mark Juergensmeyer, and Jonathan VanAntwerpen, 54–74. Oxford: Oxford University Press, 2011.
- Creswell, John W., and J. David Creswell. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 5th ed. Los Angeles: Sage, 2018.
- Fairclough, Norman. *Analysing Discourse: Textual Analysis for Social Research*. London: Routledge, 2003.
- Fairclough, Norman. *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language*. 2nd ed. London: Routledge, 2010.
- Fox, Jonathan. *A World Survey of Religion and the State*. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 2001.
- Haynes, Jeff. “Religion and Politics in the Contemporary World.” *International Affairs* 95, no. 5 (2019): 1025–1042.
- Hefner, Robert W. “Multiple Modernities and the Resilience of Religion in Southeast Asia.” *Journal of Asian Studies* 78, no. 4 (2019): 789–810.
- Hooker, M.B. *Indonesian Islam: Social Change through Contemporary Fatawa*. Honolulu: University of Hawai‘i Press, 2003.
- Künkler, Mirjam, John Madeley, and Shylashri Shankar, eds. *A Secular Age Beyond the West*. Cambridge: Cambridge University Press, 2018.
- Madeley, John. “Religion and the State.” In *Routledge Handbook of Religion and Politics*, edited by Jeffrey Haynes, 174–191. London: Routledge, 2009.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, and Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 3rd ed. Los Angeles: Sage, 2014.
- Muhamad Ali. “Islam and Cultural Resilience in Southeast Asia.” In *Routledge Handbook of Islam in Southeast Asia*, edited by Syed Muhammad Khairudin Aljunied, 45–62. London: Routledge, 2022.
- Wodak, Ruth, and Michael Meyer, eds. *Methods of Critical Discourse Analysis*. 2nd ed. London: Sage, 2009.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2008.

This page is intentionally left blank.